

FAQ PENGECUALIAN KEWAJIBAN SNI

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa itu pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan?	Pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan adalah proses/tata cara untuk mendapatkan persetujuan pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Bidang Ketenagalistrikan.
2.	Apa regulasi yang mengatur pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan?	Permohonan pengecualian dari kewajiban pemenuhan SNI mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan, khususnya pada Pasal 6 hingga Pasal 8. Format permohonan dapat dilihat pada Lampiran V.
3.	Bagaimana tahapan pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan?	Tahapan pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2021 2. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan 3. Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI
4.	Apa saja persyaratan/dokumen untuk pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan?	Persyaratan/dokumen untuk pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor induk berusaha (NIB) 2. Data spesifikasi barang yang meliputi jenis, tipe, dan jumlah

		<p>3. Foto berwarna wujud fisik produk paling sedikit dari 4 (empat) sisi yaitu depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan;</p> <p>4. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan/atau peredaran produk sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2021.</p>
5.	<p>Berapa lama <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pengurusan pengecualian kewajiban SNI Bidang Ketenagalistrikan?</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.</p>